

- Persepsi tentang masalah
- Agregasi
- Organisasi
- Representasi
- Penyusunan Agenda
- Legitimasi
- Perumusan kebijakan
- Penganggaran



- Implementasi
- Pemantauan
- Evaluasi
- Penyesuaian
- Terminasi

PERUMUSAN KEBIJAKAN MENURUT BEBERAPA PAKAR

Jenkins (1978:17)

- ◆ Inisiasi
- ◆ Informasi
- ◆ Pertimbangan
(*consideration*)
- ◆ Pelaksanaan
(*implementation*)
- ◆ Evaluasi
- ◆ Terminasi

Hogwood & Gunn (1984:4)

- ◆ *Deciding to decide*
- ◆ *Deciding how to decide*
- ◆ Perumusan isu (*issue definition*)
- ◆ Prakiraan (*forecasting*)
- ◆ Penentuan tujuan dan prioritas
- ◆ Analisis pilihan
- ◆ Pelaksanaan, pemantauan dan kontrol
- ◆ Evaluasi dan tinjauan
- ◆ Penerusan, penggantian, atau penghentian kebijakan

MODEL DASAR PROSES KEBIJAKAN

	Kekuasaan terkonsentrasi	Keuasaan terpecah
Distribusi Kekuasaan Relatif Merata	1. Pemerintahan representatif di mana eksekutif yg terpadu responsif terhadap kehendak rakyat	2. Pemerintahan pluralis di mana kekuatan rakyat berperan melalui kompetisi antar kelompok
Distribusi Kekuasaan Relatif Timpang	3. Pemerintahan oleh seorang elit yang tdk representatif, atau pemerintahan yg dicengkeram pengaruh luar	4. Pemerintahan yang sulit diprediksi dan kacau (<i>chaotic</i>), dikendalikan oleh tekanan yg beragam

TEORI KEBIJAKAN SEBAGAI PROSES POLITIK

- * Teori Marxis: bahwa pada dasarnya dlm masyarakat selalu terjadi ketimpangan kekuasaan karena ketidakadilan penguasaan sumberdaya ekonomi
- * Robert Dahl (1961): Teori pluralis; bahwa masalahnya bukan ketimpangan sumberdaya ekonomi, tetapi sumber kekuasaan terbagi secara timpang. --> perlu pendekatan pluralis.
- * Jurgen Habermas (1987): Diskursus (wacana) adalah masalah penting dalam struktur kekuasaan.

TEORI PILIHAN RASIONAL

- * Teori ini pada dasarnya menggunakan kaidah-kaidah ekonomi dalam menjelaskan pilihan rasional perumus kebijakan
- * Gordon Tullock (1976): dalam pasar politik, para pemangku kepentingan bersaing untuk menanggapi tuntutan kelompok-kelompok penekan
- * Graham T. Allison (1981): perilaku organisasi pada dasarnya dapat dijelaskan dengan perilaku individu yang rasional
- * P. Dunleavy (1991): Birokrat yang rasional adalah para perumus kebijakan yg sesungguhnya, yang melihat kebijakan dengan kalkulasi anggaran dan peluang.

MODEL JARINGAN (NETWORK)

- * Schmitter (1974): kebijakan adalah bentuk representasi kepentingan, diorganisasi menurut konstituen
- * Milward & Franscisco (1983): perumus kebijakan harus mampu menjadi “corporatist interest intermediation”
- * Sabatier & Jenkins-Smith (1999): dasar penting perumus kebijakan modern adalah kerangka koalisi untuk advokasi (advocacy coalition framework)
- * Toke & Marsh (2003): pemahaman mengenai kebijakan membutuhkan analisis yang dalam terhadap jaringan kebijakan (policy networks).

TEORI KELEMBAGAAN (INSTITUTIONAL THEORY)

- * Selznick (1949): organisasi publik adalah tempat orang merumuskan kebijakan. Organisasi semestinya adalah entitas yang bersifat adaptif.
- * March & Olsen (1984): demokrasi politik bukan hanya tergantung kepada pertumbuhan ekonomi dan keadaan sosial masyarakat, tetapi juga pada rancangan institusi politik yang ada.
- * Skocpol (1994): pendekatan insitutional diperlukan untuk memastikan bahwa perumusan kebijakan publik bersifat responsif terhadap kepentingan umum.
- * Frederickson & Smith (2003): membangun institusi yang representatif dan rasional adalah salah satu tugas pokok dalam perumusan kebijakan modern.